

Penguatan Kapabilitas Aparatur Desa dalam Mendukung Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Strengthening the Capability of Village Officials to Support Accountability and Transparency in Village Fund Management

Ferry Diyanti^{1✉}, Anisa Hasya Nazhara², Adelia Salma³

¹Universitas Milawarman, Samarinda, Indonesia.

²Universitas Milawarman, Samarinda, Indonesia.

³Universitas Milawarman, Samarinda, Indonesia.

✉ Corresponding author: ferry.diyanti@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Kegiatan ini berbentuk pendampingan, diskusi sekaligus sharing ilmu yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas aparatur desa dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. Tim pelaksana kegiatan berasal dari unsur dosen dan mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Danau Redan Kabupaten Kutai Timur. Tahap kegiatan PKM terdiri atas: pemetaan kondisi, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Hasil pelaksanaan dan evaluasi menggambarkan bahwa aparatur desa telah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai dalam pengelolaan dana desa. Aparatur desa juga mendapatkan tambahan pengetahuan selama proses kegiatan berjalan sehingga hal ini diharapkan dapat mendukung akuntabilitas dan transparansi yang lebih baik lagi di periode berikutnya.

Abstract

This activity took the form of mentoring, discussion and knowledge sharing, aimed at strengthening the capability of village officials to support accountability and transparency in village fund management. The implementation team consisted of both lecturers and students. This activity was conducted in Danau Redan Village, East Kutai Regency. The stages of this Community Service (PKM) program included condition mapping, preparation, implementation, and evaluation. The results and evaluation indicated that the village officials have acquired adequate knowledge and understanding of village fund management. Furthermore, the officials gained additional insights throughout the process, which is expected to foster even better accountability and transparency in the subsequent periods.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Copyright © 2026 Ferry Diyanti, Anisa Hasya Nazhara, Adelia Salma.

Article history

Received 2026-02-10

Accepted 2026-04-20

Published 2026-06-30

Kata kunci

Kapabilitas;
Akuntabilitas;
Transparansi;
Aparatur Desa.

Keywords

Capability;
Accountability;
Transparency;
Village Officials.

PENDAHULUAN

Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pengetahuan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa (Maryono dkk., 2023). Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah, pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran khusus dalam bentuk Dana Desa. Dana ini bertujuan untuk mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat desa (Usman dkk., 2020). Namun, seiring dengan besarnya dana yang digelontorkan setiap tahunnya, terdapat kebutuhan yang mendesak untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat desa secara efektif dan transparan. Pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan Dana Desa menjadi hal yang sangat penting guna menjamin bahwa penggunaan dana tersebut berjalan sesuai dengan tujuan awalnya. Pengelolaan keuangan desa merupakan aspek vital dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat grassroot (Ra'is & Rini, 2024). Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan dalam penerapannya (Marpaung & Averio, 2023).

Besarnya jumlah Dana Desa setiap tahun disertai dengan tantangan besar dalam pelaporan penggunaannya. Permasalahan yang sering muncul di lapangan adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut, yang terkadang dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat desa. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa sering kali menjadi hambatan dalam menerapkan akuntabilitas dan transparansi yang memadai. Akibatnya, terdapat berbagai ketidakpuasan dari masyarakat jika tidak ditangani dengan baik. Pada prinsipnya dalam pengelolaan dana desa harus transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dan konsisten (Putra dkk., 2018). Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pada sektor pemerintahan, akuntabilitas menjadi prinsip yang penting untuk pengungkapan informasi keuangan karena berhubungan dengan penggunaan APBN dan APBD (Anggraini dkk., 2024; Hartono, 2025). Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini berupaya untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam dalam rangka penguatan kapabilitas aparatur desa melalui pendampingan, diskusi dan sharing ilmu mengenai aspek akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.

Melalui kegiatan ini, tim PKM berfokus pada pemahaman akan pentingnya pertanggungjawaban dalam setiap aspek penggunaan Dana Desa. Pertanggungjawaban dana yang baik tidak hanya akan meningkatkan efektivitas penggunaan, tetapi juga dapat menguatkan hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pendampingan, diskusi dan sharing yang dirancang untuk memperkuat pemahaman aparatur desa mengenai pengelolaan dana desa yang akuntabel.

Kegiatan PKM ini juga bertujuan untuk membangun budaya transparansi di tingkat desa. Budaya ini penting karena dalam jangka panjang, transparansi akan memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Apabila masyarakat mendapatkan akses informasi yang jelas tentang penggunaan dana desa, mereka akan merasa lebih percaya dan bersemangat untuk turut serta dalam mengawasi dan mendukung program-program pembangunan. Transparansi juga dapat menjadi kunci untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana karena masyarakat akan memiliki informasi yang memadai untuk memantau pergerakan keuangan desa. Kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam membentuk sistem pengelolaan dana desa yang lebih akuntabel, transparan, dan berkelanjutan di desa. Dengan adanya partisipasi yang aktif dari semua pihak, para pemangku kepentingan dapat memastikan bahwa Dana Desa akan dikelola secara bertanggung jawab dan tepat guna untuk kemajuan bersama.

METODE

Tim pelaksana kegiatan PKM berasal dari unsur Dosen dan Mahasiswa. Sasaran kegiatan ini adalah aparatur Desa Danau Redan Kabupaten Kutai Timur. Tim PKM melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam rangka mendukung kelancaran proses kegiatan. Adapun tahap-tahap kegiatan PKM secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pemetaan Kondisi

Tahapan ini merupakan langkah awal tim PKM untuk mendapatkan gambaran pengelolaan keuangan Desa Danau Redan secara umum. Pada tahap ini, tim PKM melakukan kontak langsung via telepon dengan aparatur desa untuk menentukan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan. Tim PKM juga melakukan pemetaan kondisi awal mengenai pengelolaan dana desa yang telah dijalankan selama ini. Hal ini diperlukan untuk memastikan kebutuhan dan model kegiatan yang akan dilakukan pada tahap berikutnya.

Persiapan

Pada tahap ini, tim mempersiapkan semua materi yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas dalam kegiatan PKM. Tim juga melakukan diskusi internal untuk menentukan ruang lingkup dan poin-poin penting yang akan disampaikan dalam kegiatan tersebut. Proses persiapan kegiatan pendampingan ini dilakukan selama ± 2 (dua) hari sebelum jadwal pelaksanaan kegiatan PKM. Selama proses persiapan ini, tim juga membuat kerangka kerja secara umum mengenai apa saja yang dilakukan selama proses pendampingan sehingga diharapkan nantinya kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan lancar.

Pelaksanaan

Tahap ini merupakan inti dari kegiatan PKM yang dilaksanakan. Pada tahap ini, tim melaksanakan kegiatan dalam bentuk pendampingan informal, diskusi dan sharing ilmu terkait dengan pengelolaan Dana Desa. Kegiatan berjalan secara interaktif dua arah dengan melibatkan tim PKM dan aparatur desa sehingga diharapkan target kegiatan yaitu penguatan kapabilitas untuk mendukung proses akuntabilitas dan transparansi dapat tercapai.

Evaluasi

Evaluasi ini dilakukan untuk mendapatkan masukan dari aparatur Desa sehingga dapat menjadi bahan perbaikan pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan PKM berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM ini telah berjalan lancar dan sesuai dengan target yang diharapkan. Peserta kegiatan yang terdiri atas aparatur desa sangat antusias untuk mengikuti kegiatan. Materi yang dibahas selama proses pendampingan informal, diskusi dan sharing ilmu lebih berfokus pada pengelolaan dana desa yang berjalan selama ini dan kendala atau permasalahan yang dihadapi.

Proses pendampingan, diskusi dan sharing ilmu ini dilaksanakan selama sekitar 2 jam di kantor Pemerintah Desa setempat. Tim PKM lebih menjelaskan dari sisi teori maupun pengalaman yang diperoleh selama ini, sementara aparatur desa juga berbagi informasi terkait dengan praktik dan pengalaman mereka selama mengelola Dana Desa. Tim PKM berusaha mencari solusi untuk setiap kendala yang dihadapi, sehingga diharapkan dalam proses pengelolaan Dana Desa di periode-periode berikutnya dapat berjalan dengan lancar, akuntabel, transparan dan sesuai peraturan yang berlaku. Selama kegiatan berjalan, informasi mengenai pelaksanaan mulai dari proses penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban digambarkan secara rinci dan jelas oleh aparatur desa terkait. Hal ini menjadi salah satu faktor pendukung yang memudahkan proses diskusi dan sharing ilmu mengenai tata kelola keuangan dari kedua belah pihak.

Kegiatan PKM ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kapabilitas aparatur desa mengenai pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia ini dapat menjadi pondasi yang baik bagi desa karena aparatur desa mampu bekerja lebih profesional dalam mengelola keuangan dan program pembangunan di masa depan. Setelah mengikuti kegiatan ini, aparatur desa juga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dalam memberikan informasi-informasi yang terkait dengan pengelolaan Dana Desa.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat beberapa faktor pendukung maupun kendala yang dihadapi. Faktor pendukung selama pelaksanaan kegiatan PKM adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya dukungan dari Kepala Desa dalam memfasilitasi kegiatan PKM, baik sebagai fasilitator penghubung dengan jajaran aparatur desa untuk pengaturan waktu pelaksanaan maupun dalam hal menyiapkan fasilitas kegiatan dan perlengkapan yang digunakan.
- 2) Adanya dukungan penuh dari pendamping desa yang turut serta berdiskusi bersama aparatur desa dan tim PKM selama pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan desa ke depan.
- 3) Adapun kendala yang dihadapi dalam kegiatan PKM ini yaitu waktu yang relatif singkat untuk pembahasan mengenai pengelolaan Dana Desa sehingga pemberian solusi hanya terbatas pada permasalahan yang diangkat selama proses kegiatan berjalan. Dokumentasi kegiatan dapat dilihat pada gambar 1 dan 2.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan PKM



Gambar 2. Peserta Kegiatan

SIMPULAN

Kegiatan PKM ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menguatkan kapabilitas aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa. Setelah mengikuti kegiatan PKM, aparatur desa dapat melaksanakan tata kelola yang lebih baik, akuntabel dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini akan sangat membantu aparat desa karena memiliki implikasi secara langsung terhadap kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, L. D., Wulandari, T., Purnamasari, E. D., & Faradillah, F. (2024). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Dana Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas di Desa Lembak Kabupaten Muara Enim. *Reswara : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 111–118. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v5i1.3700>
- Hartono, H. (2025). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Undang Undang Desa dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance). *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2(4), 3046–4560. <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn>
- Marpaung, R. J. H., & Averio, T. (2023). Pelatihan Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Desa. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 193–198. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v3i2.2115>
- Maryono, M., Daniel Bagana, B., & Budi Santosa, A. (2023). Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Mengawal Dana Desa menuju Masyarakat Desa Sejahtera. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2, 96–101
- Putra, Z., Devi Maulidasari, C., & Budianto. (2018). PKM Pengelolaan Keuangan Desa Secara Profesional Menuju Desa yang Kuat dan Mandiri (Sasaran Program: Aparatur Pemerintah Gampong dalam Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh). *Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 821(1), 1–11. <http://journal.stiem.ac.id/index.php/resona/index>
- Ra'is, D. U., & Rini, Y. T. (2024). Program Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 2(3), 689–694
- Usman, Latief, A., & Hariadi, J. (2020). Pendampingan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 270–278.